



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Renja Perubahan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBDP), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum



Anggaran (KUA) Perubahan dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja Pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Rencana Kerja Perubahan merupakan Rencana Kerja perubahan selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan Langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mendukung perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Pembangunan pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perubahan Renja memuat program , kegiatan, Lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Komunikasi , Informatika, Teknologi Informasi, Statistik, Persandian dan Kehumasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) P Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga menyelaraskan tujuan,



sasaran, program dan kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik , Persandian dan Kehumasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan hasil yang akan dicapai Kabupaten Tana Tidung dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan diatas maka tujuan pembangunan kabupaten Tana Tidung selama periode pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah pembangunan Kabupaten Tana Tidung. pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan dan kemampuan serta Visi jangka panjang Kabupaten Tana Tidung yaitu “Masyarakat Kabupaten Tana yang Agamis, Harmonis, Mandiri Dan Sejahtera,” Kemudian dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2024 yaitu Ibrahim Ali dan Hendrik dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: **Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)**

yaitu **Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH). Dalam**



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi diatas, selanjutnya disusun misi yang mencerminkan tentang segala daya dan upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi Tana Tidung 2021-2026 Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Tata Ruang Wilayah

Misi 3: Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam

Misi 4 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi 5: Meningkatkan Kemandirian Desa

Misi 6 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Misi 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) P Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 akan menyelaraskan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program Pembangunan ditingkat perangkat daerah selaras dengan program Pembangunan di Tingkat Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman juga sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan Pembangunan bidang komunikasi, informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan di Kabupaten Tana Tidung. Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagai berikut:



1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang- undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomr 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5887);
8. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan penyelarasan kerka serta Pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikina Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);



18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Maksud

Untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar sektor Pembangunan dan antar Tingkat pemerintahan. Dalam urusan pengembangan e-government, pengembangan komunikasi media dan data informasi/ statistik, pengelolaan persandian serta lintas urusan dan lintas pemerintahan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung

Tujuan

- a. Sebagai dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika



- b. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025



Bab II berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab III berisi tentang Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV menguraikan rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilengkapi dengan indicator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB V. PENUTUP

Bab V berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Penyusunan program/Kegiatan yang ada pada Dokumen Renja Tahun Anggaran 2025 harus berpedoman pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana kerja, Pada bab ini akan disajikan pada data informasi antara program/kegiatan yang termuat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pada format evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pada format evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dari Triwulan I-IV Tahun 2025 diketahui bahwa:

1. Sebanyak 5 (Lima) Program (100%) pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan program yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Sebanyak 15 (100%) kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan program yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025
3. Sebanyak 28 Sub Kegiatan (95%) pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan Sub Kegiatan pada Renja (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 , dan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yakni: **Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah.**

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam



mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. (Arikunto et.al 2008, Hal 21).

Pada dasarnya evaluasi adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program sehingga, secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun Tahun 2025 dan telah dilaksanakan pada Semester 1 (satu) Tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan Pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, professional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan 2025.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan misi ke 6 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dan Visi Kepala Daerah yaitu : **Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis”**.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- A. Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



- A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - Membangun Metada Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi dan Monitoring Rencana Kerja Tahun 2024 Triwulan II (Dua) Dinas Komunikasi dan Informatika akan diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1

Evaluasi dan Monitoring Rencana Kerja Triwulan II (Dua) Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika

0	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
										II			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3					4	5	8		10		13 = (9 + 10 + 11 + 12)	
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	100 %	Rp 6,600,548,896	30%	Rp -	100%	Rp 1,183,962,456
	2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	10	Rp 10,000,000		Rp -		Rp -



	2	16	01	2.02	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 10,000,000			3	Rp -
	2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 6,560,548,896		Rp -		Rp 1,183,962,456
	2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Rp 6,310,548,896			31	Rp 1,183,962,456
	2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp 250,000,000			3	Rp -
	2	16	1	2.05		Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		10	Rp 30,000,000		Rp -		Rp -



	2	16	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Rp 30,000,000			0	Rp -
	2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pelayanan Kantor	100%	Rp 240,000,000				
	2	16	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 50,000,000				
	2	16	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp 80,000,000				
	2	16	1	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp 10,000,000				



g	2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp 100,000,000				
	2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	0	Rp -				
	2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Rp -				
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan	100	Rp 308,000,000				



	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp 3,000,000				
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp 55,000,000				
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 250,000,000				
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	Rp 40,000,000				



	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	5	Rp 30,000,000				
	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	15	Rp 10,000,000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													
Predikat kinerja													
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Rp 1,624,174,436		Rp -	0%	Rp 167,700,000



	2	16	02			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80	Rp 671,458,104		Rp -		Rp 26,700,000
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok masyarakat Strategis Mitra Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	3	Rp 671,458,104			0	Rp 26,700,000
	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Rp 13,090,001				



	2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Rp 15,710,000				
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Rp 52,380,001				
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2	Rp 26,190,244				
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	20	Rp 104,760,000			12	Rp -



	2	16	2	2.01	013	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	Rp 459,327,858				
	2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo	34	Rp 952,716,332		Rp -		Rp 141,000,000
							Persentase Layanan Publik yang Terselenggara Secara Online atau Digital dan Terintegrasi	100					



	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Rp 7,876,330			0	Rp -
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	Rp 7,876,330				
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Rp 944,840,002				
	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Rp 157,140,001				



	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2	Rp 787,700,001			0	Rp 141,000,000
									Rp -		Rp -		Rp -
												0	Rp -
												0	Rp -

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pemukhtahiran Data Statitsik Sektoral	92	Rp 209,452,200				
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Pemukhtahiran Data Statistik Sektroal	27	Rp 209,452,200		#REF!	1000%	#REF!



	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	Rp 55,500,000			1	Rp 16,065,000
	2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4	Rp 77,289,200			0	Rp -
	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Rp 53,538,000		Rp -		Rp -
	2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	27	Rp 23,125,000			0	Rp -

Predikat kinerja



2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	80%	Rp 212,882,000				
---	----	----	--	--	---	--	-----	----------------	--	--	--	--



	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	34	Rp 212,882,000				
	2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp 27,750,000			0	Rp -
	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Rp 149,150,000			1	Rp -



	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34	Rp 35,982,000			8	Rp -
Rata-rata capaian kinerja (%)													
Predikat kinerja													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:													



Tabel 2.2

Rekapitulasi Realisasi Triwulan II

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.1

Rekapitulasi Realisasi Triwulan II (Dua)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi s.d Triwulan II		Target Triwulan III	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	2	16				PERENCANAAN					
	2	16	01	2	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap pelayanan Kantor	25%	Rp1.662.271.612,-	25%	Rp5.038.996.595,-
2	01	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	3 Doku men	Rp86.032.000,-



	2	16	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Kkordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	-	3 Laporan	Rp86.032.000,-
--	----------	-----------	-----------	-------------	--	---	--	-----------	---	-----------	----------------



	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi kesejahteraanya Dalam Satu Tahun	25%	Rp1.220.826.907,-	25%	Rp4.202.937.957,-
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31org/Bulan	Rp.1.220.826.907,-	31 Org/Bulan	Rp4.044.257.954,-
	2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	,Rp0,00-	3 Dokumen	Rp158.680.000,-
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi kesejahteraanya Dalam Satu Tahun	0	Rp0,00,-	25%	Rp66.749.500,-
	2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 Orang	Rp0,00,-	1 Orang	Rp66.749.600,-
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan ASN Diskominfo Terhadap Pelayanan kantor	25%	Rp244.578.705,-	25%	Rp361.184.141,-
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	0 Paket	Rp0,00,-	1 Paket	Rp53.784.935,-



	2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Diadakan	1 Paket	Rp61.893.760,-	1 Paket	Rp184.672.151,-
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket	Rp0,00,-	0 Paket	Rp26.975.000,-
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp182.684.945,-	1 Laporan	Rp95.752.055,-
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	25%	Rp129.306.000	25%	Rp322.773.000-
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Rp1.320.000	3 Laporan	Rp1.320.000,-
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	Rp41.586.000,-	3 Laporan	Rp31.113.000,-
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	Rp86.4000.000,-	3 Laporan	Rp290.340.000,-
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	Rp27.560.000	50%	Rp27.560.000,-
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 Unit	Rp18.940.000,-	2 unit	Rp43.285.000,-



						jabatan	dan dibayarkan				
							Pajaknya				
	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 Unit	Rp8.620.000,-	0 Unit	Rp6.000.000,-
	2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	25%	Rp393.824.153,-		Rp1.044.408.206,-
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas/ Kelompok Masyarakat Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten	0	Rp393.824.153,-		Rp1.044.408.206,-
	2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Rp130.872.753,-	3 Dokumen	Rp355.204.847,-
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	0 Dokumen	Rp0,00,-	0 Dokumen	Rp52.380.001,-



							Komunikasi Publik					
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Rp176.841.000,-	1 Dokumen		Rp275.145.500-
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	13 Layanan	R86.110.400-	13		Rp18.649.600,-
	2	16	2	2.01	013	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	Rp97.650.000,-	5 Unit		Rp361.677.858,-
	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo	10	Rp279.800.142,-	10 OPD		Rp1.687.762.748-
							Persenyawaan Layanan Publik yang Terselenggara Secara Online atau Digital dan Terintegrasi	80%		80%		



	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Nilai Indikator SPBE	2,0 Indeks	Rp17.728.300,-	2,0	Rp226.195.200,-
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	0	Rp17.728.300,-	1 Dokumen	Rp226.195.200,-
							Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Nilai SPBE	2,0	Rp557.953.213,-		Rp1.461.567.548,-
	2	16	03	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	0 Unit	Rp217.949.857,-	1 Server	Rp1.223.291.433,-
	2	16	02	2.02	07	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	-	Rp26.533.085,-	1 Dokumen	Rp238.276.115,-



							Elektronik				
	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral	30%	Rp25.946.400	50%	Rp186.327.200,-
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Pemukhtahiran Data Statistisik Sektoral	10 Perangkat Daerah	Rp25.964.400,-	10 Perangkat Daerah	Rp25.964.400,-
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp15.773.000,-	3	Rp39.727.000-
	2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDMyang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 Orang	Rp0,00		Rp77.289.200



						Membangun Metada Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	0 Dokumen	Rp10.191.400	1 Dokumen	Rp43.346.600-
	2	21	02			Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks Nilai KAMI	-	Rp50.694.942-		Rp162.187.058,-
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamana Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	8	Rp50.694.942,-	-	Rp50.694.942,-
	2	21	02	2.01	01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp0,00,-	1 Laporan	Rp27.750.000,-
	2	21	02	2.02		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp37.956.500-	1 Laporan	Rp111.193.500,-



	2	21	02	2.02	01	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 OPD	Rp12.738.442-	7 OPD	Rp23.243.558.
--	---	----	----	------	----	--	---	-------	---------------	-------	---------------



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ditemukan beberapa factor penghambat serta factor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja pada Triwulan II (Dua) . Data Penghambat dan pendorong ini didapatkan berdasarkan hasil observasi lapangan dan dihimpun oleh Tim Sunram menggunakan metode wawancara kepada Kabid./ Staf yang melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor pendorong dan penghambat adalah sebagai berikut

Faktor Pendorong Pencapaian Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Faktor Pendorong merupakan factor yang mempengaruhi peningkatan suatu kinerja guna mencapai tujuan . Adapun yang menjadi factor pendorong untuk pencapaian target kinerja Rencana Kerja Tahun 2024 baik dari segi bidang urusan maupun program /Kegiatan/ Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Bidang Komunikasi dan Kehumasan melaksanakan Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

1. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kerjasama yang baik dengan Media Massa Cetak maupun Elektronik sehingga penyebaran informasi dapat dirasakan oleh Masyarakat bukan hanya Tana Tidung namun juga di Kalimantan Utara sehingga selaras dengan keterbukaan informasi.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika giat menjalin koordinasi dengan provinsi dalam pelaksanaan program kegiatan terkait indikator kinerja yang harus dicapai dan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut
3. Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang Komunikasi dan Kehumasan memiliki Modal yatu Sumber Daya Manusia yang *capable* dalam mengoperasikan alat bantu komunikasi seperti kamera, drone dan juga editing video untuk pembuatan konten terkait pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah dan mengelola Sosial media dengan akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.

B. Faktor Pendorong Bidang Teknologi dan Informatika

Bidang Teknologi dan Informatika mengampu 1 program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan 2 kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Linngkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan E-



Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Faktor pendorong program/kegiatan ini adalah:

1. Adanya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) sehingga dapat melaksanakan penilaian indeks SPBE yang menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan *Good Governance* dan penilaian SAKIP.

C. Faktor Pendorong Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mengampu 2 (dua) urusan Program yaitu 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 2) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja dari program/kegiatan ini adalah:

1. Faktor yang mendorong terselenggaranya kegiatan dan capaian indikator setiap program/kegiatan adalah pemahaman dan komitmen SDM dari Bidang Statistik dan Persandian dalam perencanaan hingga evaluasi.
2. SDM yang mengikuti Bimbingan teknis agar meningkatnya kapasitas dalam peningkatan mutu statistik sektoral dan Sandiman di Bidang Persandian
3. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya urusan Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Badan pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung terkait dengan data data sektoral yang dipublikasikan, melaksanakan koordinasi dengan BSSN terkait dengan penyelenggaraan Persandian.

D. Faktor Pendorong Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Faktor yang mendorong tercapainya kinerja Sekretariat Diskominfo adalah:

1. Adanya Koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, terkait sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Bappeda dan Litbang memberikan saran terkait dengan perencanaan dan evaluasi dokumen perangkat daerah.
2. Sub Bagian Kepegawaian berkoordinasi dengan BKPMSPDM terkait dengan analisis jabatan,



SKP, Perjanjian kinerja dan lain sebagainya sehingga memperlancar tugas, pokok dan fungsi.

3. Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa.

2.2 Faktor Penghambat Penyelenggaraan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Ada Beberapa ASN yang Belum melaksanakan Bimbingan Teknis dan akan dilaksanakan pada Triwulan ke III (Tiga) karena akan dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan Pihak penyelenggara

b. Beberapa Sub Kegiatan yang dalam Tabel Monitoring dan Evaluasi Triwulan Dinas Komunikasi dan Informatika akan dilakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan DPA dan akan melakukan penyesuaian anggaran pada Rencana Kerja Perubahan

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) belum dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dengan optimal karena masih dalam tahap pembuatan, pembaharuan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan PPID

2. Belum dapat melaksanakan dan membentuk KIM sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, pembentukan KIM di Kabupaten Tana Tidung belum dapat direalisasikan karena belum lengkapnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang masih kurang.

3. Belum melaksanakan Podcast sebagai salah satu sarana Penyedia Informasi dan mitra pemerintah dengan Masyarakat karena saat ini masih dalam tahap pengkajian dan perencanaan.

4. Kurangnya anggaran untuk Kerjasama dengan Tv swasta terkait dengan promosi kegiatan irau namun akan dilakukan penyesuaian anggaran pada Anggaran Perubahan 2024

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Belum adanya Dokumen Rencana Induk terkait dengan penguraian rencana kebijakan jangka Panjang penguraian strategi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi karena dokumen ini terkait dengan Pelaksanaan penilaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

2. Belum terdapat pembaharuan fitur terkait dengan Aplikasi Jagataka, dan kurangnya anomaly Masyarakat dalam penggunaan Aplikasi Jagataka

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



1. Belum dapat melakukan Publikasi karena publikasi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan dalam proses tahapan penyusunan publikasi pada Aplikasi Sinan data yang merupakan Satu Data Daerah, Medis Sosial resmi .
2. Terkait dengan peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi maka akan dilaksanakan penyesuaian jadwal.
3. untuk peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sectoral akan dilaksanakan setelah Perubahan karena akan melibatkan OPD di Lingkup Kabupaten tana Tidung yang akan mendapat pelatihan statistic sectoral dari Badan Pusat Statistik.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Realisasi Launching CSIRT Dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024, Laporan akan selesai ditahapan fisik seperti Penerbitan Peraturan Bupati SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dilanjutkan dengan Pembentukan Tim CSIRT Launching.
2. Telah dilaksanakan Hasil Penilaian Peningkatan Maturitas Penanganan Sandi Negara, Keuangan belum terealisasi karena akan diadakan peningkatan SDM

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kehumasan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum dapat mengaktifkan Komunitas Informasi Masyarakat yang menjadi garda pertama dalam edukasi digital dilingkup lokal setiap Desa dan Kecamatan
- b. Belum bisa menjambatani dan meningkatkan peranan PPID setiap OPD untuk Keterbukaan Informasi Publik
- c. Pelaksanaan Evaluasi SPBE yang belum dapat melakukan tindak lanjut
- d. Kurangnya partisipasi OPD terkait dengan Indeks SPBE serta kurang konsisten dengan indikator yang sudah dipilih sebagai quickwin
- e. Belum adanya Dokumen Masterplan Terkait dengan Arsitektur SPBE
- f. Ancaman siber yang terus berkembang, pelaku kejahatan siber mengembangkan teknik serangan yang lebih canggih dan terarah, seperti malware, ransomware.



- g. Kurangnya kesadaran keamanan informasi yang rendah dan keahlian tenaga keamanan informasi yang terampil dan berpengalaman masih kurang
- h. Penyediaan infrastruktr pengelolaan Data yang belum memadai
- i. Minimnya kualitas dan kapabilitas Pengelola Data di setiap Instansi Pemerintahan
- j. Ego sektoral disetiap instansi pemerintahan

Peluang yang Dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung antara lain adalah:

- a. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga menjadi driver atau dorongan untuk terus melakukan tindak lanjut terkait dengan pelayanan kepada masyarakat
- b. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi
- c. Meningkatnya kesadaran keamanan informasi di kalangan pengguna dan tenaga ahli keamanan informasi melalui edukasi dan pelatihan keamanan informas
- d. Tersedianya platform Satu Data Indonesia dan Sinan Data yang terintegrasi
- e. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- f. Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari pelaksanan statistik sektoral

2.3 Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengembangan Sistem Informasi Berbasis IT dalam upaya Peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- b. Melakukan pelatihan untk meng-*upgrade skill* dan pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan E-Goverment



- c. Optimalisasi pembinaan Koordinasi dan fasilitasi kemitraa komunikasi dan kelembagaan serta asistensi pengelolaan informasi pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informatika
- d. Meningkatkan kemampuan literasi media digital masyarakat serta mengelola persepsi publik dengan publikasi diberbagai media
- e. Terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Goverment guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- f. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dengan didukung oleh Sandiman yang kompeten

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dibuat berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari 5 program, 13 Kegiatan, 39 Sub Kegiatan. Urusan pilihan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 4 program dan 1 program penunjang urusan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Tana Tidung

RANCANGAN AWAL 2024						RANCANGAN AWAL 2025 SESUAI KEPMEN 900.1.15.5-1317				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tana Tidung	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan kantor	100%	Rp 7.184.048.896,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tana Tidung	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan kantor	100%	Rp7.184.048.896.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang Disusun (Satuan: Dokumen)	10	10,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang Disusun	10	Rp 10.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Akhir Tahun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		



Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Tidung	(Lakip,LPPD,Calk, Laporan Realisasi (Satuan: Dokumen)	10	Rp10.000.000,00	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Tidung	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10 Dokumen	Rp 10,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun (Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, Cascading, Rencana Aksi, RKT, RKA/DPA)	10	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 10,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase Kepuasan ASN Diskominfo Terhadap Pelayanan Kantor (Satuan: Persentase)	100%	240,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pelayanan Kantor	100%	Rp 240,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan (Satuan: Unit/Buah)	8	50,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 50,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Tidung	Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang Diadakan Dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan:Unit)	10	80,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Tidung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 80,000,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadakan Dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Unit)	2	10,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	R 10,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Tidung	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi (Satuan:Kegiatan)	1	100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp100,000,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase ASN yang Terpenuhi kesejahteraanya Dalam Satu Tahun	100	Rp6.560.548.896,00	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase ASN Yang Terpenuhi Kesejahteraanya Dalam Satu Tahun	100%	Rp6.560.548.896,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah ASN Yang Menerima Honorarium Dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Bulan)	12	250,000,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp 250,000,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Tidung	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Bulan)	12	Rp6.310.548.896,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Tidung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/12 Bulan	Rp6.310.548.896,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB TANA TIDUNG



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Yang Disediakan (Satuan: Persentase)	100	308,000,000.00	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan	100%	Rp 308,000,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah Materai Yang Disediakan (Satuan: Lembar)	100	3,500,000.00	penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik,dan Air Bersih Yang Disediakan (Satuan: Bulan)	12	55,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 55,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Tidung	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(Satuan: Bulan)	12	250,000,000.00	Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 250,000,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (Satuan: Persentase)	100	35,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100	Rp 35,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tana Tidung	Jumlah Pajak, Kendaraan Dinas yang dibayarkan,BBM,dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Satuan: Unit)	8	30,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tana Tidung	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 30,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Tidung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara (satuan:Paket)	1	10,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Tidung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 10,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah (Satuan: Orang)	2	30,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Daerah	Tana Tidung	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	2 Orang	Rp 30,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Tidung	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Orang)	2	30,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Tidung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp 30,000,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan (Satuan: Persentase)	Tidak Ada	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	0	Rp -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tana Tidung	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan (satuan:Unit)	Tidak Ada	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tana Tidung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Rp -
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (Satuan: Persentase)	60	Rp 420.600.251,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80	Rp 424.378.382,00



Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Kelompok Masyarakat strategis mitra daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten.	10	Rp420.600.251,00	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Kelompok Masyarakat Strategis Mitra Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	4 Kecamatan	Rp 424.378.382,00
Pelayanan Informasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Data Yang dipublikasikan serta jumlah pengunjung yang dilayani melalui PPID (Satuan: Dokumen/Data)	500	R26.190.244,00	Pelayanan Informasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp 26.190.244,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Berita/Informasi yang dimuat atau diterbitkan pada media (Satuan:Konten)	500	Rp15.710.000,00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp 15.710.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Media Yang Bekerjasama dengan Pemda serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers (satuan:Media)	20	Rp52.380.001,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp 52.380.001,00
Tidak Ada Dalam Rencana Strategis					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	30 Dokumen	
					Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		
Layanan Hubungan Media	Tana Tidung	Jumlah Media Yang Bekerjasama dengan Pemda serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers (satuan:Media)	20	Rp 104.760.000,00	Layanan Hubungan Media	Tana Tidung	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	Rp 104.760.000,00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah SDM Yang Mengikuti Bimtek (Satuan:Orang)	1	Rp 26.190.001,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	Rp 26.190.001,00
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Kebijakan/ Landasan Hukum yang diterbitkan (satuan:Kebijakan)	1	Rp 52.380.001,00	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 52.380.001,00
Monitorin Opini dan Aspirasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Layanan Aduan Publik yang Tersedia (Satuan: Laporan)	10	Rp13.090.000,00	Monitorin Opini dan Aspirasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp 13.090.001,00
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Tana Tidung	Jumlah Komisi Informasi Daerah Yang terbentuk (Satuan:Dokumen)	1	Rp52.850.001,00	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	1 Dokumen	Rp 52.850.001,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan	Tana Tidung	Jumlah Media dan Kemitraan Komunitas Yang Tersedia	15	Rp26.420.000,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	Rp 26.420.000,00



Kemitraan Komunitas									
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tana Tidung	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (IKM) yang terbentuk (Satuan:Kelompok)	1	Rp51.790.001,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Rp 51.790.000,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tana Tidung	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	34	Rp970.012.638,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tana Tidung	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	34	Rp970.012.638,00
	Tana Tidung	Persentase Layanan Publik yang terselenggara secara online atau digital dan terintegrasi	100			Tana Tidung	Persentase Layanan Publik yang terselenggara secara online atau digital dan terintegrasi	100	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Rp18.589.637,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2,2	Rp 18.589.637,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Hosting Domain dan Sub domain yang dapat dikelola (Satuan:Aplikasi)	2	Rp7.876.330,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 7.876.330,00
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal atau situs web yang sudah didaftarkan	20	Rp10.570.000,00	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	7 Domain	Rp 10.570.000,00
Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2	Rp 951.423.001,00	Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,2	Rp 951.423.001,00
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik ((satuan: Dokumen)	1	Rp 158.570.000,00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Rp 158.570.000,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Jumlah OPD yang meningkatkan Bandwith dan akses internet yang terpasang di OPD Kab.Tana Tidung (satuan:OPD)	34	Rp 792.850.000,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Rp 792.850.000,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Aplikasi Pemerintah Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	20	Rp 3,001,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Aplikasi	Rp 3,001,00



Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tana Tidung	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemuktahiran data statistik sektoral (satuan: persentase)	92	Rp132.130.001	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tana Tidung	Persentase Perangkat Daerah (Pd) yang Melakukan data Sektoral (Satuan:Persentase)	100%	Rp 132.130.001,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pemuktahiran data statistik (satuan:OPD)	29	Rp 132.130.001,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pemuktahiran data statistik (satuan:OPD)	29 OPD	Rp 132.130.001,00
Pengembangan Infrastruktur	Tana Tidung	Jumlah aplikasi data statistik yang dikelola(satuan:aplikasi)	1	Rp 79.280.000,00	Pengembangan Infrastruktur	Tana Tidung	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Aplikasi	Rp 79.280.000,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan metadata statistik sektoral (satuan: perangkat daerah)	5	Rp 0.00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen (10 Metadata disatukan jadi 1 dokumen)	Rp 0.00
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Tana Tidung	Jumlah SDM Yang Mengikuti peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi (Satuan:Orang)	1	Rp 0,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Tana Tidung	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang	Rp 0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah perangkat daerah yang diverifikasi dan dipublikasikan data sektoralnya (Satuan:Perangkat Daerah)	20	Rp 55,500,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan dan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Rp 55,500,000.00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tana Tidung	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan:Persentase)	10%	Rp 100.410.001,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tana Tidung	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan:Persentase)	80%	Rp 100.410.001,00
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamana Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan: perangkat daerah)	2	Rp 52.840.000,00	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamana Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan: perangkat daerah)	34	Rp 52.840.000,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi pelayanan (Satuan:pelayanan)	1	Rp 0,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	Rp 0,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB TANA TIDUNG



Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tana Tidung	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi aplikasi (satuan:aplikasi)	3	Rp 0,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp 0,00
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi (Satuan:Kebijakan)	2	Rp 26.420.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Kebijakan	Rp. 26.420.000,00
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Jumlah pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi (satuan:Kegiatan)	1	Rp 26.420.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp26.420.000,00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah dan pimpinan daerah yang memanfaatkan jaringan komunikasi sandi (satuan: perangkat daerah)	2	Rp 47.570.001,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah dan pimpinan daerah yang memanfaatkan jaringan komunikasi sandi (satuan: perangkat daerah)	34 Perangkat Daerah	Rp47.570.001,00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah dan pimpinan daerah yang memanfaatkan jaringan komunikasi sandi (satuan: perangkat daerah)	2	Rp 47.570.001,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	Rp47.570.001,00

JUMLAH ANGGARAN	Rp8.810.979.918	JUMLAH ANGGARAN	Rp 8.810.979.918
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Dari tabel diatas pada hasil analisis kebutuhan tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan rancangan RKPD dikarenakan adanya perubahan nomenklatur 1350 yang menyebabkan terjadinya perubahan sub kegiatan serta terdapat penyesuaian target dan pagu anggaran pada Dinas Komunika dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. Perubahan sub kegiatan tersebut ada pada program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Apikasi Informatika, serta program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.





2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur perencana pembangunan Daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan tahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi -asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD, dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD 2021-2025 . Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk Tahun 2025 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung diakomodir dalam program dan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tematik dan arah kebijakan pembangunan nasional dijabarkan dalam RKP Tahun 2025. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu:

“Akselerasi Perumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2020-2025, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023-2024, evaluasi kebijakan tahun 2023-2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan kedalam lima Agenda Pembangunan Antara Lain:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Gambar 4.1 Agenda Pembangunan Nasional pada RKP 2025

Dari lima agenda tersebut, kemudian dijabarkan dalam penekanan tema pembangunan yaitu:

A. SDM Berdaya Saing dan Produktif

1. Transformasi Sosial, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penetapan wajib Belajar 13 Tahun;
- b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
- c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
- d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;



- e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dual -system

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:

- a) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

B. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktifitas

1. Tranformasi Ekonomi, dengan penekanan tema Pembangunan:

- a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk teritegtasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi
- b) Penguatan infrastruktur digital
- c) Pengembangan infrastruktur digital
- d) Percepatan infrastruktur IKN

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema Pembangunan:

- a) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

C. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan

1. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan penekanan tema Pembangunan:

- a) Penguatan sisitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- b) Pengembangan skema graduasi bansos
- c) peningjatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, Perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- e) peningkatan parsipasi Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai Angkatan kerja
- f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan



- g) peningkatan produksi industry pengolahan
- h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- i) penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung akan mendukung pada agenda Pembangunan transformasi ekonomi dengan focus penguatan infrastruktur digital.



Pada bagian ini akan diawali dengan dijelaskannya agenda dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Setelah ini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai visi, dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 serta penjelasan mengenai tema dan fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025. Terakhir akan dijelaskan terkait visi, misi, dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026. Penjelasan secara hirarki tersebut dilakukan agar terwujudnya keselarasan dan sinergitas antara pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana Tidung.

Tema dan Fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025

Tema RKP 2025, **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"** berfokus pada tiga pilar utama yaitu SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. **Pilar pertama**, SDM Berkualitas, bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif. Langkah-langkah yang diambil meliputi penetapan wajib belajar 13 tahun dan restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan. Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting juga menjadi prioritas, bersama dengan pemanfaatan teknologi dan perlindungan sosial adaptif. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dual-system, turut mendukung tujuan ini.

Pilar kedua, Infrastruktur Berkualitas, difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui transformasi ekonomi. Ini mencakup penguatan tata ruang udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dan pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus serta mempercepat pembangunan infrastruktur hijau. Pengelolaan air dan energi secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari pilar ini. Dalam rangka mendukung ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pemerintah akan menegakkan kebijakan reformasi manajemen pengelolaan sumber daya alam.

Pilar ketiga, Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, mengusung pertumbuhan ekonomi yang



menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan produk ramah lingkungan. Penguatan sistem jaminan sosial nasional serta pengembangan skema graduasi bansos menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Untuk memperkuat sektor ekonomi, peningkatan akses ke pasar kerja dan dukungan untuk kelompok rentan juga diupayakan. Selain itu, penguatan sistem jaminan sosial nasional dan pengembangan skema graduasi bansos akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dalam upaya mencapai SDM Berkualitas, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan penting. Salah satunya adalah wajib belajar 13 tahun untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang cukup. Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan pelayanan primer dan upaya penuntasan 344 stunting diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sejak usia dini. Teknologi dan perlindungan sosial adaptif juga akan dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dual-system diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. Infrastruktur Berkualitas menjadi fokus kedua dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas nasional. Pemerintah akan memperkuat tata ruang udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas yang lebih baik. Ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian dari rencana ini. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan sosial dan ekologi. Untuk mencapai Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen pada penguatan sistem jaminan sosial nasional. Skema graduasi bansos dirancang untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan secara bertahap keluar dari kemiskinan. Peningkatan lingkungan inklusif mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam



angkatan kerja juga diupayakan untuk mengurangi ketimpangan gender. Peningkatan produktivitas nasional juga menjadi fokus penting dalam pilar Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Pemerintah akan mengembangkan infrastruktur yang mendukung transisi energi, termasuk pembangunan energi terbarukan. Selain itu, peningkatan produksi industri hijau akan didorong untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Peningkatan akses ke pasar kerja juga akan diupayakan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan.

Dalam rangka menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan strategis. Penguatan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa melalui pendidikan budi pekerti menjadi salah satu fokus utama. Reformasi manajemen pengelolaan sumber daya alam juga akan dilakukan untuk memastikan kelestarian lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan ekologis. Pemerintah juga akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Transformasi sosial juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan SDM Berkualitas. Pemerintah akan meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dan memastikan lulusan STEAM memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dual-system akan diperkuat untuk menciptakan tenaga kerja yang siap kerja dan kompetitif. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga akan ditingkatkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Infrastruktur Berkualitas, pemerintah akan mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur hijau juga akan didorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan meningkatkan pengelolaan air dan energi secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pilar Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan juga mencakup upaya untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Pemerintah akan mendukung pengembangan industri hijau yang dapat menghasilkan produk-produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga



ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan akses ke pasar kerja untuk kelompok-kelompok marginal dan rentan. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, tema RKP 2025 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" berfokus pada **peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi yang inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.** Upaya-upaya yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan RKP 2025 dapat tercapai dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai Gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang komunikasi dan informatika. Tujuan dan sasaran yang merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung adalah; “Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis(BERSIH) ‘’. Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung mendukung dan berkontribusi dalam Upaya melaksanakan 1 (satu) misi yaitu:

Misi 6 (Enam) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung adalah pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian dan perubahan adalah sebagai berikut:



“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Transparan dan Berbasis Satu Data”

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan system tata Kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima serta keterbukaan informasi publik.



Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN			
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	$\frac{(\text{Nilai Kuesioner} + \text{Nilai Verifikasi} \times 80\%) + (\text{Nilai Presentasi} \times 20\%)}{2}$	81	Sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektorial Untuk Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$	2,8	Sesuai Peraturan BPS No 3 Tahun 2022
Terwujudnya Pemerintahan Digital / Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	$\sum (\text{Indeks Domain} \times \text{Bobot Domain}) / 100$	2,5	Sesuai Hasil Evaluasi Kemenpan RB berdasarkan Permenpan No.59 Tahun 2020



NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	FORMULASI PENGUKURAN	TIPE PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik					
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah Metode alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suara lembaga mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	(Nilai Kuesioner + Nilai Verifikasi / 2 x 80%) + (Nilai Presentasi x 20%)	kumulatif	[*Pit. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika", "Kepala Bidang Komunikasi Dan Kehumasan"]	Bidang Komunikasi dan Kehumasan
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Pembangunan					
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah alat Statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi Pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia	(Bobot Domain x Nilai Domain)	kumulatif	[*Pit. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika", "Kepala Bidang Statistik Dan Persandian"]	Bidang Statistik dan Persandian
3	Terwujudnya Pemerintahan Digital/ Pemerintahan Berbasis Elektronik					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dasar penyusunan SPBE dengan memperhatikan komparasi Peraturan PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2018 dengan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020. Nilai Indeks SPBE merupakan Nilai indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan	Indeks Domain x Bobot Domain / 100%	kumulatif	[*Pit. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika", "Kepala Bidang Teknologi & Informatika"]	Sesuai Evaluasi Kemenpan RB Berdasarkan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020



3.3 Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat dalam jangka Panjang.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada point-point sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis dalam Menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung yaitu:

1. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik

Pola pikir Masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagi informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat akan semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan Masyarakat untuk melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan public untuk menyediakan informasi dibutuhkan oleh Masyarakat. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses public terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) melalui kebijakan keterbukaan informasi public berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam Upaya meningkatkan akses public terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Piblik Belum optimal dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. Website Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan seluruh subdomain website SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah belum digunakan secara optimal bahkan tidak digunakan



yang seharusnya sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disisi lain, revolusi industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi, literasi dinilai dapat dinilai secara realistis untuk menghadapi tantangan revolusi industri yang bersifat dinamis ini. Budaya gemar membaca yang tinggi dapat mencerminkan kemudahan akses dan awarness dalam memperoleh informasi agar masyarakat dapat terhindar dari berita hoax.

Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar menjadi agen penyebarluasan informasi yang tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat.

Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok -kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung belum dapat mengoptimalkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat sehingga masih belum optimal kinerja nya dan dinilai rendah.

2. Belum optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Belum adanya infrastruktur yang terbatas seperti server jaringan internet dan perangkat keras yang mendukung layanan elektronik bisa menjadi satu sebab sebab karena system yang mengalami downtime, lambat bahkan crash, belum optimalnya maintenance server sesuai dengan SOP

Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terampil dalam memahami penggunaan teknologi dan SDM yang belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola system berbasis elektronik sehingga pelayanan tidak efektif.



Penggunaan aplikasi yang rumit, dan sulit dipahami dan antarmuka pengguna yang tidak intuitif dan sulit nya mengaksesnya. Kurangnya pengujian dan feedback dari pengguna sebelum peluncuran system juga menjadi penghambat pelayanan.

Layanan berbasis elektronik sering kali melibatkan beberapa instansi atau pihak terkait. Jika tidak ada koordinasi yang baik, data dan atau informasi yang diperlukan tidak dapat dipertukarkan secara tepat dan akurat sehingga proses pelayanan menjadi terhambat

Regulasi yang belum mendukung transformasi digital atau kebijakan yang tidak fleksibel dapat menjadi hambatan.

3. Masih Rendahnya Aksebilias dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Isu strategis ini mendasarkan pada konsep yang secara empirik terbukti di berbagai tempat bahwa aksebilitas merupakan kunci pemicu dari perkembangan suatu wilayah. Aksebilitas dipengaruhi oleh jaringan penghubung, apapun bentuknya dan kelengkapan jaringan sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur yang lebih merata, terutama pada daerah separuh provinsi Kalimantan utara yang berada dibagian barat pegunungan.

Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Kabupaten Tana Tidung belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang memiliki desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan mobile broadband atau menara jaringan seluler didaerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya didaerah non komersial yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis didaerah non komersial dan menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur seperti TIK seperti daerah tersebut:

- a) Keterbatasan Kewenangan Pemerintah daerah dalam pembangunan infrastuktur telekomunikasi ; Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan infrastuktur layanan telekomunikasi adalah kewenangan pemerintah pusat untuk didaerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sedangkan Kabupaten Tana Tidung bukan termasuk kategori daerah 3T, PKSN (Pusat Kegiatan

- Strategis Nasional) dan Lokpri (Lokasi Prioritas), sedangkan selain daerah tersebut kewenangan diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi (provider).
- b) Kondisi Topografi dan geografis Kabupaten Tana Tidung yang sulit untuk membangun infrastuktur layanan Telekomunikasi;
 - c) Penyebaran jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah yang tidak merata (kesenjangan jumlah penduduk).

Gambar 3.3

Denah Pembangunan Infrastruktur VSAT



Pemerintah daerah dapat melakukan sinergitas program dengan Kemenkominfo melalui kegiatan survey titik layanan publik yang memiliki dan tidak memiliki akses internet; survey lokasi/lahan untuk penyediaan pembangunan BTS;serta dokumen regulasi/kebijakan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan standarisasi gedung dan bangunan. Hal ini tentu disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi. Penyediaan BTS didaerah non-komersial yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler dilakukan berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan melaui peraturan antara lain Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau kecil Terluat, serta usulan usulan dari Pemerintah Daerah.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Dalam merumuskan program dan kegiatan/ sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain:

- ✚ Mempedomani RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Tana Tidung serta RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
- ✚ Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung mendapat tanggungjawab dalam menjalankan misi 6 (enam) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan meningkatkan pengguna system informasi daerah meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik meningkatkan integritas pemerintahan berbasis elektronik meningkatnya ketersediaan dan kualitas data serta informasi statistic daerah meningkatnya informasi system keamanan daerah.
- ✚ Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu diharapann akan menciptakan proses pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan public yang berkinerja tinggi.
- ✚ Pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, Kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian mendiseminasikan informasi kebijakan dan program serta peningkatan pemanfaatan informasi public melalui berbagai media.



- ✚ Ketersediaan informasi yang akurat pertumbuhan potensi sectoral di segala bidang sebagai bahan evaluasi kebutuhan penyelenggaraan pengamanan informasi dan berklasifikasi
- ✚ Indeks Keamanan Informasi (KI) pada keamanan di Tingkat Kabupaten
- ✚ Kedinamisan kemajuan teknologi dibidang komunikasi dan informatika yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang sangat pesat sehingga memerlukan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang mendukung kemajuan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 4.1

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target	Anggaran	Perkiraan Rencana Maju Tahun 2025	
							Target	Kebutuhan Anggaran
RUTIN								
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Diskomifo	76	Rp6.563.296.100,00	78	Rp8.010.082.096,00
a	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas dan Terusn dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp72.780.000,00	100	Rp100.000.000,00



a. 1	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	14	Rp72.780.000,00	14	R100.000.000,00
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
b	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanann Administrasi Keuangan yang Bersih dan optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70	Rp5.340.717.715,00	80	Rp6.560.548.896,00
b. 1	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Rp5.137.277.715,00	34	Rp6.310.548.896,00



b. 2	2.16.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp203.440.000,00	12	Rp250.000.000,00
c	2.16.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian	100	Rp138,489,600	100	Rp 125,176,600
c. 2	2.16.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Rp30.000.000,00	5	N/A
d	2.16.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkayt Daerah	70	Rp447.847.185,00		Rp545.000.000,00



d. 1	1.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp54.341.235,00	1	Rp150.000.000,00
d. 2	1.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp144.507.950,00	1	Rp145.000.000,00
d. 3	1.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp43.110.000,00	1	Rp0,00
d. 5	1.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp205.888.000,00	12	Rp250.000.000,00



e	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memastikan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedia dengan Baik	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	N/A	Rp0,00	N/A	N/A
e 2	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	Rp0,00	N/A	N/A
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	RP500.528.000,00	20	Rp308.500.000,00
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp3600.000,00	12	Rp10.800.000,00



2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp159.108.000,00	12	Rp165.000.000,00
2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12	Rp394.243.200,00	12	Rp394.243.200,00
2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang	70	Rp145.000.000,00	75	Rp234.490.000,00
2.16.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dn Dibayarkan Pajaknya	8	Rp129.770.000,00	8	Rp214.290.000,00



	2.16012.09 00006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Rp15.230.000,00	9	Rp20.000.000,00
				Persentase Informasi Publik Terverifikasi yang Tersampaikan kepada Masyarakat sesuai Standar	90		100	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Pengunjung Viewer Website dan Media Sosial Milik Pemerintah Daerah	14000	Rp1.888.625.300,00	15000	Rp902.546.101,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PPID	70		80	



2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menyediakan Akses Informasi Publik	Persentase OPD yang Menyediakan Akses Informasi Publik	100		100	
					Rp1.888.625.300		Rp902.546.101,00
		Meningkatnya Penyebarluasan Informasi/ Berita Positif yang Disampaikan ke Masyarakat melalui media cetak dan media elektronik	Jumlah Informasi Berita/Berita Positif yang Disampaikan ke Masyarakat melalui media cetak dan media elektronik	300		400	
		Meningkatnya Penyebarluasan Informasi. Berita positif yang disampaikan ke masyarakat melalui media cetak dan media elektronik	Jumlah Informasi yang Disampaikan melalui web dan media sosial resmi	1200		1300	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPID	Rata-rata kecepatan penyediaan informasi kepada masyarakat	4		3	



			Meningkatnya Koleksi Informasi Publik	Persentase Peningkatan Informasi Publik	90		100	
			Meningkatnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Jumlah KIM yang Aktif	3		4	
	2.16.02.2.0 1.0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1. Terverifikasi Dewa Pers, 2) terdaftar di Dinna Kominfo 3) Aktif dalam kegiatan relasi media	2	Rp12.600.000,00	2	Rp13.210.001,00
	2.16.02.2.0 1.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3	Rp21.000.000,00	N/A	N/A



62.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan dan tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaiann Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan dan tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaiann Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, keuangan dan Tata kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informatika	1	Rp676.346.700,00	2	Rp26.428.379,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	5	Rp521.538.300,00	7	Rp26.928.499,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Telaksannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terjadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	Rp425.480.000,00	1	Rp486.077.600,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /juknis	15	Rp70.000.000,00	15	Rp53.850.001,000



2.16.02.2.0 1.0022	Penyusunan Strategis Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategis Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	2	Rp81.634.000,00	2	Rp53.850.000,00
2.16.02.2.0 1.0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah konten informasi publik	5	Rp31.550.000,00	5	Rp16.150.000,00
2.16.02.2.0 1.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikaas Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/Pelatihan	Jumlah ASN bidang Komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/pelatihan	9	Rp125.480.000,00	2	Rp26.920.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terwujudnya Pemerintahan Digital/ Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Indikator Domain Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80	Rp1.849.888.600,00	90	Rp1.849.888.600,00



	2.16.03.2.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Publik dan layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan yang Menggunakan Aplikasi Umum	2	Rp111.786.000,00	2	Rp111.786.000,00
			Meningkatnya Layanan Publik dan layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online	Jumlah Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	5		5	
			Meningkatnya Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan secara Online	9		10	
	2.16.03.2.0 1.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2	Rp111.786.000,00		Rp111.786.000,00



	2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Pemanfaatam Infrastruktur dan jaringan yang berkualitas	Jumlah Infrastruktur yang Baik	2	Rp1.738.102.600,00	2	Rp1.738.102.600,00
				Jumlah Jaringan Dikelola dengan Baik	3		3	
				Jumlah OPD yang Menggunakan Akses Internet yang Disediakan	26		26	
	2.16.03.2.0 2.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan SPBE	1	Rp142.177.000,00	1	Rp142.177.000,00



	2.16.03.2.0 2.0003	Penyelenggara Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung jaringan intra pemerintah Daerah Kab/Kota	26	Rp1.595.925.600,00	26	Rp1.595.925.600,00
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Pembangunan Daerah	100		100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Data Terverifikasi/ Terpublikasi (Dalam Sistem SDI dan Laporan)	100	Rp449.945.000,00	100	Rp132.130.000,00



			Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Data Statistik	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Data	31	Rp449.945.000,00	31	Rp439.272.000,00
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Metadata Statistik Sektoral yang Telah Diverifikasi	Jumlah data Sektoral yang Di Verifikasi	509		609	
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan pelatihan dibidang Statistik	4	Rp277.399.000,00	4	Rp52.850.000,00
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan Statistik sektoral yang Tepat Waktu	100 %	Rp55.728.000,00	100 %	Rp52.850.000,00



2.20.02.2.0 1.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang Telah Dilengkapi Metadata	1	Rp122.550.000,00		Rp122.250.000,00
2.20.02.2.0 1.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang Sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15	Rp211.322.000,00	15	Rp211.322.000,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Terwujudnya Pemerintahan Digital/ Pemerintahan Berbasis Elektronik					
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pernagkat Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	536	Rp448.245.000,00	536	Rp448.245.000,00



	2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Publik	34	Rp448.245.000,00	34	Rp448.245.000,00
	2.21.02.2.0 1.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp166.310.000,00	1	Rp166.310.000,00
	2.21.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Rp145.103.000,00	1	Rp145.103.000,00
	2.21.02.2.0 1.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	33	Rp54.824.000,00	33	Rp54.824.000,00



	JUMLAH						Rp11.200.000.000,00	Rp11.650.033.797



BAB V

PENUTUPAN

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan analisa kebutuhan yang dilakukan dalam proses penyusunan diperoleh nilai indikatif anggaran yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.200.000.000,00 untuk menunjang 5 Program, 13 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Pagu dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebesar 10.080.000.000 dan pagu perubahan sebesar 10.450.000.000. Terdapat perubahan Sub Indikator pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Statistik dan dilakukan penyesuaian kinerja dan indikator sesuai dengan SIPD Pemukhtahiran untuk Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan RKPD perubahan Tahun 2025 Kabupaten Tana Tidung yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tana Tidung yaitu **“Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)**. Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 merupakan acuan bagi seluruh unit unit kerja yang ada dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun periode berjalan. Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan, sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan keselarasan pelaksanaan Rencana Kerja perubahan (Renja-p) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung disusun terukut berdasarkan tatalaksana dan arah kebijakan dalam Tema Ranwal RKPD



Kabupaten Tana Tidung dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

2. Semua unsur teknis pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan
3. Penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan yang didasarkan pada penyesuaian sesuai Kebutuhan Tahun 2025
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 perlu dilakukan pengendalian

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan sinergitas semua pihak terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan melalui Rencana Kerja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komperhensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan semakin terfokus untuk menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan, keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan *Good Governance*.



Kami berharap bahwa Rancangan Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dapat melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja utama, target program dan kegiatan didalamnya dapat tercapai sesuai dengan prakiraan perencanaan dan menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi daerah serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale 20 Oktober 2025



MASHURI, SE
Pembina TKJ, IV/b
NIP. 197205021998031013